

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI PEKANBARU

Fadel M. Azhari

Mahasiswa Adminitrasi Publik (FISIP Universitas Riau)
Corresponding author email: fadelazhari22@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2215-5762>

Dadang Mashur

Dosen Administrasi Publik (FISIP Universitas Riau)
Email: da2nk_mashur@yahoo.co.id
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8307-9452>

Abstract

Poverty in Riau Province is still quite high, this is caused by several factors from the phenomenon of poverty that occurs. One of the causes of the increase in the poverty rate in Riau Province is the impact of Covid-19 which has caused several phenomena such as increased unemployment, paralysis of the commercial sector due to low purchasing power of the people, inflation rate of basic needs and low quantity of goods needed. Besides the Covid-19 phenomenon, the cause of poverty in Pekanbaru is also due to the low level of Human Resources in Pekanbaru so that people are less effective in efforts to improve their welfare. TKPK in carrying out its work program, especially in business development for MSMEs, has a strategy for accelerating poverty reduction, namely business development and program synergy. TKPK is committed to overcoming the problem of poverty in Riau Province together with the relevant stakeholders to be able to carry out business development for MSMEs. This study used a purposive sampling technique with a qualitative research type with a descriptive approach, the required data such as primary data and secondary data were obtained through interviews and documentation and then analyzed based on research problems. The results of this study indicate that the TKPK's business development strategy did not work well, while the inhibiting factors of this strategy were the TKPK's commitment to carrying out its responsibilities and poor coordination between stakeholders.

Keywords: *Strategy, Business Development, and Poverty*

Abstrak

Kemiskinan di Provinsi Riau masih tergolong cukup tinggi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dari fenomena kemiskinan yang terjadi. Salah satu penyebab peningkatan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau adalah dampak Covid-19 yang menyebabkan timbulnya beberapa fenomena seperti peningkatan pengangguran, lumpuhnya sektor niaga yang

disebabkan rendahnya daya beli masyarakat, tingkat inflasi kebutuhan pokok dan rendahnya kuantitas barang kebutuhan. Disamping fenomena Covid-19 penyebab kemiskinan di Pekanbaru juga disebabkan karena rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang ada di Pekanbaru sehingga masyarakat kurang efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraannya. TKPK dalam menjalankan program kerjanya terutama dalam pengembangan usaha untuk UMKM memiliki strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu pengembangan usaha dan sinergitas program. TKPK berkomitmen dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Riau bersama dengan stakeholder yang bersangkutan dapat melaksanakan pengembangan usaha untuk UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari strategi pengembangan usaha yang diusung TKPK dalam pengentasan kemiskinan di Pekanbaru dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha yang di usung TKPK tidak berjalan dengan baik, adapun faktor penghambat dari strategi ini adalah komitmen TKPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan koordinasi antar stakeholder yang kurang baik.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Usaha, dan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Telah terjadi revolusi terkait penanggulangan kemiskinan dimana yang dulunya memiliki sistem perencanaan sentralistik dan implementasi pembangunan dengan menggunakan *top down* dan mobilisasi rakyat sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance* di era otonomi daerah ini. Kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia sendiri sudah terangkum dalam suatu rencana komprehensif penanggulangan kemiskinan model baru yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ini dimaksudkan sebagai landasan utama (*common platform*). Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh semua pihak.

Kemiskinan di Provinsi Riau masih tergolong cukup tinggi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dari fenomena kemiskinan yang terjadi. Salah satu penyebab peningkatan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau adalah dampak Covid-19 yang menyebabkan timbulnya beberapa fenomena seperti peningkatan pengangguran, lumpuhnya sektor niaga yang disebabkan rendahnya daya beli masyarakat, tingkat inflasi kebutuhan

pokok dan rendahnya kuantitas barang kebutuhan. Disamping fenomena Covid-19 penyebab kemiskinan di Pekanbaru juga disebabkan karena rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang ada di Pekanbaru sehingga masyarakat kurang efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraannya.

Dasar hukum pembentukan TNP2K sendiri melalui Perpres no. 15 tahun 2010, pasal 6 ayat 2 dan digantikan oleh Perpres no 96 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. TKPK sendiri ada pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten kota, yang pada Provinsi Riau ini ditanggung jawabkan oleh Gubernur Riau dan diketuai langsung oleh Wakil Gubernur Riau. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau memiliki Sekretariat dalam menunjang kinerjanya, Sekretariat Pokja pendukung TKPK dibentuk berdasarkan SK Kepala Bappeda Provinsi Riau No. Kpts, 15/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 dan terletak pada bidang II Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Provinsi Riau.

Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau diatur dalam Keputusan Gubernur Riau No. : Kpts. 1442/ X/ 2020. Dalam struktur tim Wakil Gubernur Riau langsung menjadi ketua tim sedangkan Wakil Ketua diisi langsung oleh Sekdaprov dan sekretaris oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Riau. Anggota TKPK tidak hanya dari kalangan pemerintah saja tetapi juga ada dari kalangan lainnya seperti dunia usaha dan akademisi. TKPK dalam menjalankan program kerjanya terutama dalam pengembangan usaha untuk UMKM memiliki strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu pengembangan usaha dan sinergitas program. TKPK berkomitmen dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Riau bersama dengan stakeholder yang bersangkutan dapat melaksanakan pengembangan usaha untuk UMKM. TKPK memiliki 3 program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam menjalankan tugasnya yaitu bantuan sosial yang terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, pemberdayaan masyarakat, dan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Program usaha ekonomi mikro dan kecil ini adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi dan kecil yang ada di Provinsi Riau terutama yang ada di Kota Pekanbaru. Program usaha ekonomi mikro dan kecil ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Bentuk implementasi program ini adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan di kota Pekanbaru kepada beberapa UMKM yang terdata di Pekanbaru, adapun program tersebut adalah pelatihan, bimbingan, bantuan dana, dan bantuan fasilitas yang ditanggung jawab oleh Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau atas arahan dari TKPK Provinsi Riau.

Masalah yang dialami oleh UMKM yang di Kota Pekanbaru adalah kurangnya modal dari pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Disamping kekurangan modal pelaku UMKM yang ada di Pekanbaru masih banyak yang memiliki SDM yang kurang sehingga disini perlu adanya program yang bias mengembangkan UMKM di Pekanbaru sehingga angka

kemiskinan dapat dikurangi.



TKPK menjalankan fungsinya sebagai tim penanggulangan kemiskinan, telah menyusun strategi untuk mengedepankan kewajibannya. Salah satu strategi TKPK adalah Pengembangan usaha dan menjamin keberlangsungan usaha mikro ekonomi dan usaha kecil. Bentuk penerapan strategi pengembangan usaha adalah memberikan wadah peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang UMKM dan memberikan kemudahan pada pelaku UMKM dalam melaksanakan usahanya dan juga dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat lainnya dan untuk mendukung strategi ini juga diperlukan sinergitas program kebijakan dan program penanggulan kemiskinan yang dilakukan oleh intansi lain terkait agar kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran pada masyarakat.

TKPK Provinsi memiliki tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD bidang kemiskinan dan pengoordinasian forum SKPD melalui bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Renja dan RENSTRA SKPD serta pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. Pengendalian TKPK dimaksudkan dalam pemantauan supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program atau kegiatan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, pemantauan program pengentasan kemiskinan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi, setelah itu disusun dalam bentuk hasil pantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.

Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan pengaduan masyarakat, TKPK menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan dengan output yang dihasilkan adalah SKPD 5 tahunan yang memuat data kondisi kemiskinan, mapping sebaran kemiskinan, mapping program berdasarkan sumber anggaran (APBN, APBD KAB/KOTA, NON PEMERINTAHAN), mapping berdasarkan kelompok program, strategi percepatan, analisis peluang hambatan (SWOT) , dan LP2KD tahunan yang memuat laporan pelaksanaan strategi pada SPKD tahun berkenaan dan rekomendasi untuk perbaikan secara singkatnya TKPK memiliki kewenangan dalam mengintervensi semua program dari instansi maupun stakeholder yang bersangkutan untuk mengarahkan kepada pengentasan kemiskinan. Untuk anggaran sendiri TKPK hanya memiliki anggaran sekretariat dalam menjalankan fungsinya dan untuk anggaran program atau kegiatan pengentasan kemiskinan langsung dari instansi terkait yang menjalankan kegiatannya.

No	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggaran
1	Program pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM	2.462.870.186
2	Program Perlindungan dan pengamanan perdagangan	345.135.800
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	375.756.340
4	Program pertumbuhan dan perkembangan Industri	375.756.340
	Jumlah	4.068.179.129

Tabel diatas bisa kita lihat program dari masing-masing instansi dan stakeholder yang ada yang sudah diintervensi TKPK dengan strategi pengembangan usaha di Provinsi Riau. Dalam mengintervensi program tersebut TKPK menggunakan strategi yang mereka usung agar program yang dilakukan stakeholder yang ada dapat tepat sasaran dan efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk anggaran dalam pelaksanaan program sendiri menggunakan anggaran stakeholder yang bersangkutan. Setelah program ini dilaksanakan maka TKPK akan melakukan evaluasi tingkat keberhasilan terhadap program yang terlaksana dan akan dimasukkan dalam laporan tahunan TKPK.

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	516.368	28,60	2,52	0,31	0,06
2020	589.281	30,40	2,62	0,48	0,13

Tabel diatas bisa kita lihat jumlah penduduk miskin baik dari Kota Pekanbaru terlihat fluktuatif dan cenderung naik. Data ini bersumber dari BPS pusat dan BPS Provinsi Riau yang kemudian dianalisis oleh TKPK melalui aplikasi analisis situasi kemiskinan dan anggaran daerah dengan *project* analisis belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Data ini berguna dalam analisis dan evaluasi kebijakan serta program dari masing-masing OPD dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau secara khususnya dikota Pekanbaru.

SDGs secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Berbeda dengan MDGs, SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam hal ini juga berusaha dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ada beberapa point utama yang menjadi fokus tujuan pembangunan berkelanjutan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau seperti menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, dan mengurangi ketimpangan. Poin tersebut adalah aspek utama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Riau. Terwujudnya poin tersebut dilakukan TKPK dalam koordinasi dari setiap stakeholder yang ada di Provinsi Riau. Melalui strategi yang diusung oleh TKPK dalam menjalankan tugasnya tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.



Masalah kemiskinan adalah masalah krusial yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan maka dibentuklah Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau adalah perwakilan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertugas dalam mengintegrasikan program dari setiap stakeholder yang ada, terkait penanggulangan kemiskinan dengan memiliki wewenang untuk mengintervensi program yang ada agar memberikan ruang dalam tujuan pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia terkhususnya di Provinsi Riau masih tergolong tinggi dikarenakan beberapa faktor seperti dampak covid-19 dan sebagainya menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan dari sebagian masyarakat Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari khusus ke umum, dan menafsirkan makna data secara deskriptif.

Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah agar peneliti dapat lebih mendalami strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh TKPK Provinsi Riau dalam usaha pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru melalui strategi pengembangan usaha. Dilihat dan diamati strategi pengembangan usaha tersebut sangat berpengaruh pada upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang Digunakan

Strategi Strategi berasal dari kata Yunani *stratos* (*stratos* = militer, dan *ag* = memimpin) yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Rachmat 2014:15).

Menurut Turban et al (2012:619) strategi adalah rumusan dasar untuk bagaimana suatu bisnis dapat menyelesaikan misinya, apa tujuan yang seharusnya, serta apa rencana dan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Nitisusantoro (2010; 217) pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah

usaha.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebagai dasar untuk kebijakan pengentasan kemiskinan, memahami masalah kemiskinan seringkali menuntut adanya upaya pendefinisian, pengukuran dan pengidentifikasian akar-akar penyebab kemiskinan. Sebenarnya sudah banyak terdapat berbagai kajian yang ditunjukkan untuk mengklasifikasikan orang miskin dan menganalisis penyebab kemiskinan, namun demikian upaya-upaya tersebut belum tuntas. Hal ini karena kemiskinan multidimensi dan karena kemiskinan bersumber dari aneka kondisi (Hatmadji, 2004:124).

Berdasarkan jumlah penduduk miskin akan berpotensi menciptakan permasalahan sosial yaitu menurunnya kuantitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial, politik serta meningkatnya angka kriminalitas. (Abilawa, 2016:46). Seseorang dinyatakan miskin jika tidak dapat memenuhi standar minimum kebutuhan dasarnya atau kebutuhan pokok untuk hidup, hal ini sering disebut dengan kemiskinan konsumsi atau kemiskinan material.

SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015–2030 yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum) (Santono,2015).

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi dengan informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan usaha yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau dalam mewujudkan sustainable development goals di Kota Pekanbaru kepada UMKM yang berada di Kota Pekanbaru dan faktor apa saja yang mempengaruhi implentasi program dari strategi pengembangan usaha UMKM di Kota Pekanbaru yan dimotori oleh Tim

Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Riau. Maka dengan itu penelitian ini melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang terpilih terkait strategi pengembangan usaha yaitu dengan informan anggota Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau dan UMKM yang bersangkutan.

Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru

Implementasi program dari strategi pengembangan usaha yang diusung oleh TKPK disebut KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang dilakukan pada UMKM yang terdata untuk diberikan bantuan dan pembinaan oleh Pemerintah yang mana disini sebagai pengawas dan Pembina adalah pihak Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Riau dan Kota Pekanbaru yang diintervensi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Ada sebanyak 23 UMKM yang terdata pada program ini, yang nantinya akan diberikan beberapa program kegiatan seperti bantuan modal, bantuan alat, pembinaan, dan pelatihan.

Strategi pengembangan usaha yang dipromotori Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau tersebut memiliki salah satu program dari stakeholder yang berasal dari pemerintahan. Stakeholder yang dimaksud adalah Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi dan juga dari Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program dari implementasi strategi pengembangan usaha yang diintervensi TKPK masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Strategi pengembangan usaha ini masih belum terlaksana dengan baik. Implementasi intervensi dari TKPK dalam mengusung strategi pengembangan usaha belum tercapai *goals* yang diinginkan. Peneliti mengkaji pelaksanaan strategi ini melalui teori Nitisusantoro (2010:217) yang berbunyi pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha. Dari teori tersebut peneliti melihat implementasi strategi dari beberapa indikator yang berkaitan dengan teori tersebut.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki roda perekonomian dibidang perdagangan yang cukup tinggi dilihat dari banyaknya sub sector perdagangan dan UMKM yang tumbuh Kota Pekanbaru. UMKM yang ada di Pekanbaru dipenuhi berbagai macam sector seperti produk dan jasa. Dengan tumbuh suburnya UMKM di Kota Pekanbaru menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Pekanbaru dan menjadi salah satu cara efisien dalam menekan angka kemiskinan yang ada di Pekanbaru.

Dalam Strategi pengembangan usaha yang diusung oleh Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Riau salah satu fokus utamanya adalah melakukan pemberdayaan suatu usaha oleh UMKM di Pekanbaru. Pemberdayaan menurut penelitian ini sendiri berarti meningkatkan sumber daya manusia dibidang pengembangan usaha mikro

kecil dan menengah atau UMKM. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi sebagai lembaga koordinasi dalam pengentasan kemiskinan mengkoordinasikan kepada stakeholder dalam memperdayakan UMKM di Kota Pekanbaru, stakeholder yang dimaksud disini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Provinsi Riau dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Usaha TKPK dalam Pemberian Fasilitas Suatu Usaha UMKM di Pekanbaru

Fasilitas adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Fasilitas yang dimaksud disini mencakup alat-alat yang memudahkan kegiatan usaha yang berjalan seperti kelengkapan alat produksi, dan juga fasilitas disini juga mengacu pada tempat dalam melakukan usaha. Tanpa adanya fasilitas yang mempunyai kegiatan pelaku usaha tidak akan berjalan dengan lancar, maka dari itu pemerintah hadir sebagai pihak yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada pelaku usaha agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan lancar dan tujuan pengembangan usaha dapat terlaksana.

Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan melalui Dinas perindustrian Provinsi dan kota membantu para pelaku UMKM dalam pemenuhan fasilitas yang mereka perlukan, memberikan bantuan alat produksi demi menunjang berjalannya kegiatan pengembangan usaha. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah dalam membantu UMKM adalah memberikan akses fasilitas ke depan kepada UMKM di Pekanbaru dalam memasarkan produknya.

Dinas perindustrian dan perdagangan sudah memfasilitasi sebagai fasilitator kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Diharapkan dari fasilitas yang diberikan dapat mendorong pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Tetapi pemerintah tidak ada mengeluarkan regulasi khusus terkait fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha.

Pelaku usaha pun menyambut dengan senang ketika diberikan fasilitas berjualan dari pemerintah. Mereka antusias dalam menggunakan fasilitas yang diberikan, dilihat dari banyaknya UMKM yang meramaikan kegiatan berjualan di food court di Arifin Ahmad tersebut. Dengan adanya food court juga menarik perhatian warga Kota Pekanbaru sehingga kunjungan food court sendiri selalu ramai setiap harinya.

Usaha TKPK dalam Pembinaan Suatu Usaha UMKM di Pekanbaru

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana, teratur dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan dan pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara operasional, pola pembinaan yang dilakukan terhadap UMKM meliputi beberapa aspek, yakni aspek SDM, permodalan, teknologi, serta pasar dan informasi pasar. Oleh karena itu, unsur pembinaan merupakan kata kunci untuk menentukan maju mundurnya program pengembangan ekonomi kerakyatan.

Program pembinaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang perangkat hukum dan peraturan, pendampingan dan bimbingan usaha, termasuk memberikan berbagai pengetahuan melalui praktik lapangan dan in house training. Kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka upaya pengembangan UMKM akan dapat terealisasi dengan baik.

Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi maupun kota Pekanbaru dalam bentuk pendampingan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan pengembangan usahanya. Pendampingan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Tenaga Penyuluh Lapangan.

Usaha TKPK dalam Bantuan Perkuatan Suatu Usaha UMKM di Pekanbaru

Bantuan perkuatan adalah memberikan bantuan kebutuhan yang diperlukan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan mengembangkan usaha. Bantuan perkuatan bisa dalam bentuk alat-alat yang diperlukan untuk melancarkan usahanya dan dalam bentuk permodalan yang diperlukan pelaku usaha. Bantuan perkuatan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha difasilitasi oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Riau.

Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau (TKPK) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi Riau dalam mewujudkan Sustainable development goals di kota Pekanbaru, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan strategi pengembangan usaha Tim Koordinasi Kemiskinan Provinsi Riau dalam mewujudkan sustainable development goals di Kota Pekanbaru . Faktor-faktor tersebut antara lain;

Lemahnya Komitmen Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah mengintegrasikan program kemiskinan dan mengintervensi seluruh stakeholder yang bersangkutan untuk mengentaskan kemiskinan melalui strategi yang mereka usung. Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sendiri harus bisa mengintervensi setiap stakeholder agar menyisipkan pengentasan kemiskinan dalam setiap program yang dilakukan.

Tetapi fakta dilapangan yang peneliti temui adalah kurangnya peran dan intervensi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terkait stakeholder yang menjadi pelaksana program dari strategi pengembangan usaha. Hal ini bisa dilihat dari UPT. IPOK dan Logam yang menjadi Unit pelaksana tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi pelaksana pengembangan usaha UMKM di Pekanbaru yang tidak terjamah peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau sehingga mereka melakukan kegiatan pengembangan usaha secara sendiri tanpa

adanya integrasi dari stakeholder lainnya. Sehingga program yang dilakukan menjadi tumpang tindih dan kurang efektif.

Koordinasi antar stakeholder yang tidak baik

Koordinasi menjadi tugas utama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi Riau. Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi antar stakeholder yang ada dalam melakukan program pengentasan kemiskinan melalui strategi pengembangan usaha agar program yang ada terintegrasi dengan baik dan dapat kepada target sasaran secara efektif. Koordinasi juga memastikan bahwa tidak adanya tumpang tindih program terhadap target sasaran agar program bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Koordinasi antar stakeholder dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau sudah berjalan tetapi masih juga ditemukan miss koordinasi antar lembaga dalam menjalankan tugas dan perannya.

Lemahnya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyebabkan adanya tumpang tindih program. Tumpang tindih ini terjadi karena setiap lembaga yang menjalankan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui strategi pengembangan usaha bergerak sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Lembaga lain merasa bahwa tidak adanya program sehingga mereka melakukan program pengembangan usaha tanpa adanya koordinasi dengan instansi lainnya dan seharusnya TKPK hadir untuk melaksanakan tugasnya, tetapi koordinasinya masih lemah dan tidak terjangkau kepada setiap stakeholder yang ada.

Fokus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau lebih kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau adalah lembaga yang mengkoordinir program pengentasan kemiskinan. Kinerja TKPK sendiri pada intervensi kepada stakeholder atau instansi untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan, fokus utama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau saat ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin pada desil 1 dan 2. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Untuk pelaku usaha sendiri dinilai sudah berada di desil 3 atau tidak termasuk masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pelaku usaha sendiri tergolong masyarakat yang sudah cukup mapan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam hal ini pelaku usaha tidak terlalu berperan dalam angka penurunan kemiskinan, dalam hal ini Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau tidak terlalu fokus dalam strategi pengembangan usaha kepada pelaku usaha di Pekanbaru.

Adanya ketimpangan fokus dalam penerapan strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau menyebabkan adanya ketimpangan program yang dilaksanakan. Ketimpangan ini menjadikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau tidak efektif dalam menjalankan strategi pengembangan usaha tidak terlalu fokus kepada

pengembangan usaha pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru.

Ketimpangan program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau bisa kita lihat kepada program yang diintervensi oleh TKPK sendiri dan juga program yang direalisasikan serta post anggaran terhadap program yang terlaksana oleh setiap stakeholder yang ada. Hal ini bisa dilihat dari LP2KD TKPK yang memuat program dan anggaran yang terlaksana untuk pengentasan kemiskinan. Dunia UMKM sendiri lebih sedikit program yang diintervensi yang menunjukkan fokus TKPK lebih ke pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. UMKM hanya beberapa program yang diintervensi dan post anggaran untuk pelaksanaan program tersebut jauh lebih kecil dari program lainnya yang fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. TKPK menggolongkan pelaku UMKM berada di desil 3 yaitu golongan masyarakat yang terlepas dari desil 1 dan desil 2 yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bentuk uraian pada bab pembahasan sebelumnya, maka penelitian terkait strategi pengembangan usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian strategi pengembangan usaha yang diusung Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau yang diintervensikan kepada setiap stakeholder yang ada di Kota Pekanbaru untuk melakukan program pengentasan kemiskinan melalui strategi pengembangan usaha, dan di handle oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terlaksana tetapi tidak terlaksana dengan baik yang sesuai dengan tujuan pengembangan usaha pelaku usaha seperti UMKM atau IKM agar terlaksananya pengentasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan sustainable development goals , program yang dilaksanakan yang mengacu pada strategi pengembangan usaha sesuai dengan hasil penelitian terlaksana oleh Dinas atau instansi yang bersangkutan tetapi masih ditemukan kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Bisa dilihat dari peran dan kontribusi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau yang tidak terlaksana penuh pada setiap program yang dijalankan. Lemahnya peran dan kontribusi tersebut menyebabkan strategi yang diusung Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau tidak terlaksana dengan baik melalui program yang dijalankan.
2. Faktor penghambat Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau dalam Mewujudkan sustainable developments goals di Kota Pekanbaru yang peneliti temukan adalah sebagai berikut :
 - a. Lemahnya komitmen Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau
 - b. Koordinasi stakeholder tidak baik dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau
 - c. Fokus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau

lebih kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang berada pada desil 1 dan desil 2 yang tergolong masyarakat miskin

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau dalam mewujudkan sustainable development goals di Kota Pekanbaru, peneliti memberikan sedikit saran sebagai berikut :

1. TKPK harus melakukan perannya sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan melalui intervensi pada program secara lebih kuat lagi agar setiap stakeholder yang ada dapat sama-sama melakukan program pengentasan kemiskinan secara terintegrasi
2. TKPK harus melakukan intervensi dalam melakukan strategi pengembangan usaha yang berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan terutama poin pengentasan kemiskinan dan lingkungan
3. Pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan pembinaan secara massif dan memberikan bantuan perkuatan usaha yang berbasis lingkungan kepada pelaku usaha di Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Deddy Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handyaningrat, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Cv Haji Masagung
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung. Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang. Universitas Brawijaya
- Loh. 2001. *Kosa Kata Ensiklopedia Administrasi*.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Syafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan*. Jakarta. Baduose Media.
- Solihin Ismail. 2012. *Manajemen Strategi*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung R&DAfabeta, hal: 220
- David, Fred. R. 2004. *Manajemen Strategis:Konsep-Konsep*. Jakarta: PT.Indeks
- David, Fred. R. 2014. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Jurnal

- Dassaad. (2018). *Analisis pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di indonesia*. 1417-1422.
- Kartika, I. (2013). Strategi Pengentasan Kemiskinan Terhadap Penurunan Rumah Tangga Miskin Di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 26-33.
- Brata, J. T. (2019). Pengelolaan Organisasi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Kendari. *Journal of Political Science*, 1(2), 60-71.
- Diko Algasi. (2019). *Evaluasi Strategi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro (Studi Kasus Di Kecamatan Metro Utara) Diko*. 2(3), 49-62.
- Khaerunnisa, S. N., & Mahasiswa. (2019). *Tangani Kemiskinan Melalui Program Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) Siti Nurauliyah Khaerunnisa*. 5, 14-28.
- Nurcahya, E., & Alexandri, M. B. (2020). Analisis Swot Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 257-267. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3354>
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160-172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.793>
- Suradi, I. dan. (2018). *Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data Di Kota Semarang Poverty Alleviation Based On Data Integration In Semarang Manucipal Irmayani dan Suradi*. 8(01), 1-13.

Wanto, A., & Hardinata, J. T. (2019). Estimasi Penduduk Miskin di Indonesia sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*, 4(2), 198–207.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/cess/article/view/13601/pdf>

Peraturan

Perpres no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
Perpres no 96 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
Pergub Provinsi Riau No. Kpts. 1442/ X/ 2020 tentang pembentukan pengurus TKPK
SK kepala BAPPEDA Provinsi Riau No. Kpts, 15/1/2018 tanggal 25 Januari 2018
tentang secretariat TKPK

Dokumen

Aplikasi analisis kemiskinan dan anggaran daerah tahun 2010
RP2KD TKPK Provinsi Riau
LP2KD TKPK Provinsi Riau

Website

<https://www.sdg2030indonesia.org/#modalIconDefinition>
<http://tkpk.riau.go.id/pages/profil-tkpk>
<https://riau.bps.go.id/publication/2020/04/27/a7d70bfbb3ce90b6b6a640d6/provinsi-riau-dalam-angka-2020.html>
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41841/perpres-no-96-tahun-2015>